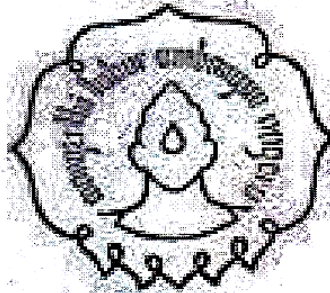


**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA
SECARA *ONLINE* SEBAGAI TINDAK PIDANA *CYBER CRIME***



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat

Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta

Oleh

Devy Suciati

NIM. E0013121

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI
BOLA SECARA *ONLINE* SEBAGAI TINDAK PIDANA *CYBER CRIME***

Oleh:

Devy Suciati

E0013121

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 7 Maret 2017**

Pembimbing



Prof. Dr. Supanto S.H., M.Hum
NIP.19601107 1986011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA

JUDI BOLA SECARA *ONLINE* SEBAGAI TINDAK PIDANA

CYBER CRIME

Oleh :

DEVY SUCIATI

NIM : E.0013121

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari

: Jumat

Tanggal

:

DEWAN PENGUJI

1. Sabar Slamet, S.H., M.H.

NIP. 195607271986011001

Ketua

2. Subekti, S.H., M.H.

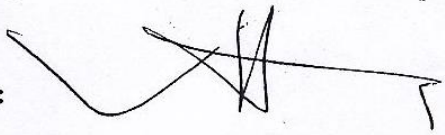
NIP. 196410221989032002


Sekretaris


3. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

NIP. 196011071986011001

Anggota

: 

: 

: 



Mengetahui,
Dekan

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

NIP. 196011071986011001

PERNYATAAN

Nama : Devy Suciati

NIM : E.0013121

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA SECARA *ONLINE* SEBAGAI TINDAK PIDANA *CYBER CRIME*** adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 7 Maret 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Devy Suciati
NIM. E0013121

ABSTRAK

Devy Suciati. E0013121. 2017. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA SECARA *ONLINE* SEBAGAI TINDAK PIDANA *CYBER CRIME*. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan sanksi pidana dan ketentuan hukum yang layak terhadap tindak pidana judi bola secara *online*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana penjara bagi pelaku tindak pidana judi bola secara *online* bertentangan dengan teori hukum tentang *cyber crime*. Model pengambilan keputusan bagi pelaku judi bola secara *online* sebaiknya mengutamakan peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis derogat legi generalie*) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian secara *online* yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2). Jadi pengambilan keputusan yang dilakukan tidak hanya menerapkan sanksi pidana dan ketentuan hukum yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci : Tindak Pidana Judi Bola Online, Penerapan Sanksi Pidana, *Lex Specialis Derogat Legi Generalie*.

ABSTRACT

Devy Suciati, E0013121, 2017 THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CRIMINAL ACTS OF BALL ONLINE GAMBLING AS CYBER CRIME. FACULTY OF LAW SEBELAS MARET UNIVERSITY SURAKARTA

This research aims to determine the form of the application of criminal sanctions and the provisions of the law of criminal offences against a decent online football gambling. This research is the normative legal research which is prescriptive. The data, which used in this writing, was secondary data. Secondary data used include primary legal materials and legal secondary materials. Data collection techniques are used, namely the study of librarianship. The results showed that the application of criminal law to jail for perpetrators of criminal acts of ball online gambling contrary to theory of law about cyber crime. A decision-making model for offender online football gambling should give priority to regulations that are more specific (lex specialis derogat legi generali), namely regulation Law Number 19 of 2016 juncto Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions about governing the crime of gambling online which is contained in Article 27 Paragraph (2) of the act of information and Electronic Transactions. So decision making is done not only to apply criminal sanctions and provisions of law that are in the Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Keywords: online football gambling , the application of criminal sanction, Lex Specialis derogat Legi Generalie .

MOTTO

Berjuang dalam menghadapi kehidupan dengan selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dan tidak pernah kuatir akan apapun juga yang terjadi karena Tuhan ada disisi kita untuk memampukan kita melewati segala kesusahan dengan sebaik mungkin sehingga hanya nama Tuhan yang ditinggikan dalam setiap hal yang kita kerjakan.

(Mazmur 37 : 5

“Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak”.

Amsal 2 : 5-6

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu”.

Ulangan 1 : 17

“Dalam mengadili jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapa pun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah”.

Matius 6 : 25,33,34

“Karena itu Aku berkata kepadamu : Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian?

..... Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari”.

SKRIPSI PENULIS INI PERSEMBAHKAN KEPADA :

Almamater Universitas Sebelas Maret Surakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah menganugerahkan keselamatan dan mencurahkan kasih setia-Nya bagi Penulis. Bersyukur atas hikmat, pengetahuan, kekuatan, dan kemampuan yang telah dikaruniakan-Nya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA SECARA *ONLINE* SEBAGAI TINDAK PIDANA *CYBER CRIME*”**.

Adapun tujuan dari penulisan hukum (skripsi) ini adalah untuk memperoleh derajat sarjana dari Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penyusunan penulisan ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, semangat dan berbagai pengetahuan. Dengan diselesaikannya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Dosen Pembimbing. Terima kasih telah meluangkan waktu dengan kesabaran dalam memberikan bimbingan, ilmu, nasihat dan arahan kepada penulis.
2. Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik Penulis.
3. Subekti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin penulisan hukum ini.
6. Orang tua Penulis Blasius Hartopo dan Brigita Sri Lestari yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7. Kakak Penulis Agatha Rizky Agustine yang terus memberikan doa, semangat dan penghibur dalam penulisan hukum ini.
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Teman-teman Penulis yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2013 atas kebersamaannya selama ini dan semoga sukses.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian kiranya masih dapat memberi manfaat bagi perkembangan kajian keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta almamater Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, 24 Februari 2017

Penulis,

Devy Suciati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan tentang Tindak Pidana	11
2. Tinjauan tentang Pemidanaan	16
3. Karakteristik Tindak Pidana Teknologi Informasi	22
4. Tindak Pidana Perjudian	26
B. Kerangka Pemikiran	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Ketentuan Hukum Pidana yang dapat Diterapkan dalam Tindak Pidana Judi Bola secara <i>Online</i>	34

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Judi Bola secara <i>Online</i>	39
B. Pembahasan.	40
1. Ketentuan Hukum Pidana yang dapat Diterapkan dalam Tindak Pidana Judi Bola secara <i>Online</i>	40
2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Judi Bola secara <i>Online</i>	48
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	57
A. Simpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi dan informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi kini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan penting bagi kemajuan sebuah bangsa (Budi Suhariyanto, 2013: 1).

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi bagai pisau bermata dua. Selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, teknologi informasi dan telekomunikasi juga dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat, dan negara (Adami Chazawi, 2015:2).

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini berkembang sangat pesat. Hampir seluruh masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses setiap informasi secara luas dan tanpa batas (*borderless*), misalnya dengan penggunaan internet pada media sosial. Kemudahan dalam pengaksesan informasi tidak menutup kemungkinan munculnya dampak buruk. Sebagai contoh, media sosial saat ini semakin dalam mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat luas. Munculnya dampak buruk tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penggunaan media sosial melalui teknologi informasi dan telekomunikasi. Kemudian lahir lah suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber (*cyber law*) secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi (Adami Chazawi, 2015:2).

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru, misalnya: kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase,

provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun kerusakan *hardware*, dan berbagai macam lainnya. Di Indonesia sendiri banyak sekali kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi dan telekomunikasi, yang biasa disebut dengan kejahatan teknologi (*cybercrime*), para pelaku kejahatan tersebut menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mencari korban dan mencari keuntungan dari kejahatan yang dilakukan. Contoh berbagai macam *cyber crime* yang ada saat ini seperti: prostitusi *online*, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, serta salah satunya adalah perjudian secara *online*. Saat ini sedang marak kasus perjudian secara *online* dikalangan masyarakat luas, seperti: judi togel secara *online*, judi bola pingpong, judi togel singapore, dan salah satunya adalah judi bola secara *online*.

Perjudian secara *online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Perjudian secara *online* diatur didalam KUHP Pasal 303 dan 303 bis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta adanya Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian secara *online*, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sisi lain, laju *cyber crime* tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah dengan perangkat hukumnya yang belum mampu untuk mengimbangi laju *cyber crime* sehingga sulit untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi (Budi Suhariyanto, 2013: 3).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukanlah undang-undang Tindak Pidana Khusus. Namun, memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu, hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah

mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pula mengenai hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat, oleh karena pada setiap undang-undang selalu di dalamnya dimuat pula mengenai hukum pidana, tidak terkecuali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Adami Chazawi, 2015: 3).

Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (*cybercrime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.

Didalam sistem hukum pidana di Indonesia dikenal adanya asas tentang berlakunya undang-undang, salah satunya adalah asas *Lex specialis derogat legigenerali* yang artinya adalah undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum dalam undang-undang tersebut diatur secara jelas tentang tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat perjudian (Pasal 27 A ayat (2) *juncto* 45 Ayat (1)), dalam tindak pidana judi bola secara *online* hakim hanya menerapkan sanksi yang memuat unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP saja dalam dakwaannya dan tidak menerapkan sanksi yang terdapat di dalam undang-undang yang lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang apakah ketentuan hukum yang tepat dalam tindak pidana judibola secara *online* dan sanksi pidana apakah yang selayaknya diterapkan dalam tindak pidana judi bola secara *online*. Oleh karena itu, penulis mengangkat skripsi dengan judul **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA SECARA *ONLINE* SEBAGAI TINDAK PIDANA *CYBER CRIME***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas agar permasalahan yang diteliti lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka perumusan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum pidana yang dapat diterapkan dalam tindak pidana judi bola secara *online*?
2. Apakah sanksi pidana yang layak diterapkan dalam tindak pidana judi bola secara *online*?

C. Tujuan Penulisan

Dalam setiap penulisan penelitian hukum pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Terdapat dua jenis tujuan dalam pelaksanaan suatu penelitian, yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Tujuan obyektif merupakan tujuan yang berasal dari penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan subyektif adalah tujuan yang berasal dari penulis itu sendiri. Adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

Tujuan Penulisan Obyektif

1. Untuk mengetahui apakah hakim sudah tepat dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana judi bola secara *online*.

2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang layak diterapkan dalam tindak pidana judi bola secara *onlinedi* Indonesia.
3. Untuk mengetahui bentuk ketentuan hukum pidana yang dapat diterapkan dalam tindak pidana judi bola secara *online*.

Tujuan Penulisan Subyektif

1. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan tentang hukum kedalam sebuah penulisan penelitian hukum dan mengkaji masalah hukum pidana, terutama mengenai tindak pidana judi bola secara *online*.
3. Untuk mengembangkan teori-teori hukum yang didapat dalam sebuah penulisan penelitian hukum.

D. Manfaat Penulisan

Dalam setiap penulisan penelitian hukum pasti terdapat manfaat dari penulisan penelitian hukum itu sendiri, terdapat dua macam manfaat dalam penulisan penelitian hukum, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian itu sendiri.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap permasalahan yang serupa yang dibahas dalam penulisan hukum ini
 - b. Dapat mengembangkan ilmu hukum yang didapat untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat dalam sebuah penulisan penelitian hukum.

E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai cara yang telah dipikirkan secara matang yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah tertentu demi tercapainya sebuah tujuan. Sementara itu, penelitian diartikan sebagai pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pegumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan (Rinto Adi, 2004: 1).

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56).

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah sifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, penelitian hukum yang dilakukan oleh praktisi maupun para *scholar* tidak dimulai dengan hipotesis. Sehingga dalam hal ini bukan hanya sekedar menetapkan aturan yang ada, selain juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 69). Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan memberikan preskripsi tentang ketentuan hukum pidana yang tepat dan penerapan sanksi pidana yang layak berdasarkan asas berlakunya undang-undang di Indonesia dalam tindak pidana judi bola secara *online*.

3. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-

pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 103).

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan berarti peneliti menggunakan khususnya instrumen hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generalie* dalam penerapan sanksi pidana dalam kasus judi bola *online*. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan ini yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 134). Terkait pendekatan kasus peneliti menggunakan putusan Nomor 438/Pid.B/2016/PN.Lbp terkait dengan kasus judi bola secara *online*.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis akan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder di dalam penelitian normatif lebih dikenal dengan sebutan bahan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 179).

b. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2013:

181). Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
- c) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti dalam penulisan hukum (skripsi) penulis ini menggunakan:

- a) buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum
- b) kamus hukum
- c) jurnal-jurnal hukum
- d) artikel
- e) bahan-bahan dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga dalam pengumpulan sumber hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik ini merupakan cara pengumpulan sumber bahan hukum dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, sumber hukum mengenai tindak pidana judi bola secara *online*, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan silogisme deduksi dengan menempatkan premis mayor dan premis minor. Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minor adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut akan ditarik konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90).

Sehingga dalam hal ini yang menjadi premis mayor adalah berbagai instrumen, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Premis minornya adalah fakta hukum yaitu adanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp, dimana Agus Salim Lubis alias Krp yang menjadi pelaku dalam memberikan fasilitas bermain judi bola secara *online* kepada masyarakat luas. Berdasarkan teknik analisis data di atas, maka dapat diperoleh pembahasan dan kesimpulan atas rumusan masalah yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat lebih memberikan gambaran secara komprehensif dan menyeluruh mengenai pembahasan yang akan disusun. Oleh karena itu, penulis menjabarkan dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam tiap-tiap bab terdapat sub-sub bagian sehingga dapat mempermudah pemahaman terhadap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum (skripsi).

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang kejahatan teknologi (*cyber crime*), dan tinjauan tentang tindak pidana perjudian secara *online*. Selain itu, untuk memudahkan pemahaman alur berfikir, maka dalam bab ini juga disertai dengan kerangka pemikiran.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan pembahasan, menjawab, dan menguraikan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu apakah ketentuan hukum pidana dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana judi bola secara *online* dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp sudah tepat.

BAB IV: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Perkembangan Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang dilakukan oleh seseorang dan seseorang tersebut perlu dikenakan sanksi terhadap perbuatan yang dia lakukan sebagai suatu teguran. Ada banyak jenis ancaman pidana yang dapat dikenakan bagi seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, semuanya itu terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yaitu Pidana Penjara, Pidana kurungan, Pidana Denda, dan Pidana Tambahan.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan (Lamintang, 2014: 179).

Menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” (Lamintang, 2014: 180).

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een niet doen* atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang

terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *een nalaten* yang juga berarti hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang (Lamintang, 2014: 191).

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.

Unsur subyektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan si pelaku itu harus di lakukan. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1) Kesengajaan

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut *wet*. Ada tiga macam kesengajaan, yaitu:

a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

b) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

c) Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Kesengajaan harus memiliki tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat dari pokok dilarang perbuatan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

- 2) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
- 3) macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan –kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- 4) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP (Moeljatno, 2000:171).

Unsur obyektif dari suatu tindak pidana antara lain:

- 1) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat
- 3) kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang, 2013:194).

c. Subyek Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barangsiapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subyek tindak pidana pada umumnya adalah orang (*persoon*) ataupun badan hukum (Teguh Prasetya, 2010: 54). Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap subjek hukum dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok antara lain pidana mati, pidana penjara, kurungan, atau denda. Pidana tambahan antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, atau pengumuman putusan hakim.

d. Jenis Tindak Pidana

Para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang berusaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat mengenai jenis-jenis tindak pidana melawan hukum, semula telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang dimaksud dengan *rechtsdelicten* yakni

karena delik-delik semacam ini bertentangan dengan hukum yang tertulis, sedang yang dimaksud dengan *wetsdelicten* itu adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk di hukum, karena dinyatakan demikian di dalam peraturan-peraturan undang-undang.

Menurut van Hamel, pembagian dari tindak pidana menjadi tindak pidana “kejahatan” dan tindak pidana “pelanggaran” itu telah mendapat pengaruh dari pembagian dari tindak pidana yang disebut *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*. Pembagian dari tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita menjadi Buku ke-2 dan Buku ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagiseluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan (Lamintang, 2014: 209).

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana selanjutnya masih terdapat sejumlah pembagian-pembagian lainnya dari tindak pidana-tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Delik formal (*formeel delict*) dan delik material (*materieel delict*)
Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Delik material adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) *Delicta commissionis*, *delicta omissionis*, dan *delicta commissionis per omissionis commissa*
Suatu tindak pidana itu dapat terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan. *Delicta commissionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. *Delicta omissionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang.
- 3) *Opzettelijke delicten* dan *culpooze delicten*
Berkenaan dengan disyaratkannya suatu “kesengajaan” (*opzet*) atau “ketidaksengajaan” (*culpa*) di dalam berbagai rumusan delik, kita dapat membedakan antara: *Opzettelijke delicten* atau delik yang oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja” dengan *culpooze delicten*, yakni delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.
- 4) *Zelfstandige delicten* dan *voortgezetta delicten*

Zelfstandige delicten adalah delik-delik yang berdiri sendirisedang yang dimaksud dengan *voortgezetta delicten* adalah delik-delik yang pada hakikatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, yang karena sifatnya dianggap sebagai suatu delik.

5) *Enkelvoudige dan samengestelde delicten*

Enkelvoudige adalah delik-delik yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *samengestelde delicten* adalah delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut suatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut berulang kali melakukan tindakan yang sama yang dilarang oleh undang-undang.

6) *Aflopemde delicten dan voortdurende deicten*

Aflopemde delicten adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *voortdurende delicten* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma.

7) *Klacht delicten dan gewone delicten*

Klacht delicten atau delik-delik aduan seperti termaksud diatas misalnya delik-delik yang telah dirumuskan dalam Pasal-pasal 72, 73, 74, 75, 284 ayat 2, 287 ayat 2, 293 ayat 2, 319,320 ayat 2, 321 ayat 3, 332 ayat 2, 335 ayat 2, 367 ayat 2, dan 369 ayat 2 KUHP, sedang delik-delik selebihnya di dalam KUHP itu merupakan *gewono deicten* atau delik-delik biasa yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan.

8) *Gemene delicten dan politieke delicten*

9) *Delicten communia dan delicta propria*

Delicten communia adalah delik-delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sedang yang disebut dengan *delicta propria* adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh orag-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu misalnya pegawai negeri.

10) *Eenvoudige delicten, gequalificeerda delicten, dan gepriviligieerde delicten*

Eenvoudige delicten atau delik-delik yang sederhana adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Selanjutnya *gequalificeerda delicten* atau delik-delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Terakhir, *gepriviligieerde delicten* atau delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan (Lamintang, 2013:212-224).

2. Pengertian tentang Pidana

a. Teori Pidana

“Pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum pidana” (Barda Nawawi Arief, 2002: 129).

Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan bahwa pembedaan pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral (Dwidja Priyanto, 2006:24).

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

1) Teori absolut atau teori pembalasan

Teori absolut berpijak pada dasar pembalasan. Dasar pembalasan inilah pembedaan dari penjatuhan penderitaan berupa pidana kepada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi untuk memberikan penderitaan bagi penjahat (Adami Chazawi, 2002: 153).

Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menurut Johannes Andenaes tujuan dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (Mahrus Ali, 2012 : 189).

2) Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki;
- c) Bersifat membinasakan (Adami Chazawi, 2002: 162).

Sifat pencegahan dari teori ini ada 2 macam, yaitu:

- a) Pencegahan umum

Berdasarkan teori pencegahan umum adalah untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pembedaan, maka pelaksanaan pidana harus dilaksanakan secara keadilan dan dimuka umum.

- b) Pencegahan khusus

Teori pencegahan khusus lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya ke dalam bentuk perbuatan nyata (Adami Chazawi, 2002: 161)

Teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Teori ini menekankan pada kemampuan pembedaan sebagai upaya mencegah terjadinya kejahatan khususnya bagi terpidana (Mahrus Ali, 2012 : 190).

Implikasi dalam praktik pelaksanaan pidana seringkali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi (M Abdul Kholiq, 1999: 60).

Ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipermasalahkan kepada sipelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegah kejahatan
- e) Pidana melihat ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (Mahrus Ali, 2012 : 191).

3) Teori gabungan

Teori ini berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Penjatuhan sanksi pidana diadakan selain untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik pada teori absolut dan relatif. Penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya membalas tindakan orang itu, juga upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat (Mahrus Ali, 2012 : 192).

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat,
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Adami Chazawi, 2002: 166).

b. Jenis-jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana maka jenis hukuman menurut yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- 1) Pidana Pokok terdiri dari:
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana tutupan
- 2) Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Penyitaan benda-benda tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim (Adami Chazawi, 2002: 25).

Adapun penjelasan pidana pokok yaitu:

1) Pidana mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat, dimana pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, maka pidana mati menimbulkan pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Kelemahan dari pidana mati, apabila telah dilaksanakan maka tidak memberi harapan perbaikan apabila ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan. Pembentuk Undang-Undang pada saat itu telah menyadari akan sifat dari pidana mati, meskipun pidana mati dicantumkan dalam Undang-Undang tetapi harus dipandang sebagai tindakan darurat. Setiap kejahatan yang diancam pidana mati selalu diancam pidana alternatif, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana setinggi-tingginya 20 tahun. Sehingga hakim tidak selalu harus menjatuhkan pidana mati bagi kejahatan yang diancam pidana mati (Adami Chazawi, 2002: 29).

Kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya pada kejahatan yang dipandang sangat berat, yang jumlahnya sangat terbatas, misalnya:

- a) Kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat (3) jo.129);
- b) Kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu atau dilakukan dengan faktor pemberat (Pasal 340);
- c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur atau faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4);
- d) Kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444) (Adami Chazawi, 2002: 31).

Pidana penjara

- 2) Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal dengan istilah pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup (Mahrus Ali, 2012 : 196).

- 3) Pidana kurungan

Pasal 10 KUHP terdapat 2 jenis pidana hilang kemerdekaan, yakni pidana penjara dan kurungan. Sifat menghilangkan atau membatasi kemerdekaan, yakni menempatkan terpidana dalam suatu tempat, dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, mentaati, dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku (Adami Chazawi, 2002: 32). Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukumannya.

Pidana kurungan dalam beberapa hal sama dengan pidana penjara, yaitu:

- a) Sama berupa hilang kemerdekaan
 - b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun minimum pidana kurungan sama yaitu 1 hari, sedangkan maksimum khusus tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung pada berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
 - c) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan tertentu, tetapi untuk narapidana kurungan lebih ringan dari pada narapidana penjara.
 - d) Tempat menjalani pidana penjara dan kurungan adalah sama, tetapi ada sedikit perbedaan harus dipisah.
- 4) Pidana denda

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Pidana denda juga diancamkan pada jenis kejahatan ringan maupun

kejahatan culpa. Pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan (Adami Chazawi, 2002: 40).

Pidana denda dalam praktik jarang sekali dijatuhkan oleh hakim, hakim lebih memilih menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda hanya diancamkan sebagai alternatif dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Terpidana yang dijatuhi pidana denda, apabila denda tidak dibayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Terpidana boleh segera menjalani kurungan pengganti denda tidak perlu menunggu sampai habis membayar denda. Apabila terpidana kemudian membayar denda maka demi hukum ia harus dilepasakan dari kurungan pengganti denda tersebut (Adami Chazawi, 2002: 41).

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan ditambahkan kedalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Pasal 2 ayat 1 menyatakan, dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan (Adami Chazawi, 2002: 41).

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Namun dalam praktiknya pidana tutupan tidak pernah diterapkan (Mahrus Ali, 2012 : 200).

Penjelasan pidana tambahan, yaitu:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Undang-Undang memberikan wewenang kepada negara melalui alat atau lembaganya hanya untuk melakukan pencabutan hak-hak tertentu saja menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP. Hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, sifatnya tidak untuk selama-lamanya melainkan hanya untuk

waktu tertentu saja, kecuali jika yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati (Adami Chazawi, 2002: 44).

2) Perampasan barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, ada 2 jenis (Pasal 39), yaitu:

- (a) Barang yang diperoleh atau berasal dari suatu kejahatan bukan dari pelanggaran.
- (b) Barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan (Adami Chazawi, 2002: 50).
- (c) Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh UU, misalnya Pasal 128, 206, 361, 377, 395, 405. Pidana pengumuman putusan hakim adalah suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Tujuan pengumuman putusan hakim ditujukan sebagai upaya mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang serta memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan orang yang agar tidak menjadi korban dari kejahatan (Adami Chazawi, 2002: 53).

3. Karakteristik Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cyber Crime*)

a. Pengertian Teknologi Informasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 butir 3 menjelaskan mengenai pengertian teknologi informasi sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.

Menurut Nasution istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *technologia* yang menurut Webster Dictionary berarti *systematic treatment* atau penanganan sesuatu secara sistematis, sedangkan *techné* sebagai dasar kata teknologi berarti *art, skill, science* atau keahlian, ketrampilan, ilmu. Teknologi informasi mencakup sistem-sistem komunikasi seperti satelit siaran langsung, kabel interaktif dua arah,

penyinaran bertenaga rendah (*low-power-broad-casting*), komputer (termasuk personal komputer dan komputer genggam yang baru), dan televisi (termasuk video disk dan video tape cassette). Secara sederhana yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah ilmu yang diperlukan untuk mengolah informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Isi dari ilmu tersebut dapat berupa prosedur, cara-cara dan teknik untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah atau menelusuri informasi secara efisien dan efektif (Lamintang, 2013:212-224).

b. Pengertian Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cyber Crime*)

Pada masa awalnya, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah "*computer misuse*", "*computer abuse*", "*computer fraud*", "*computer-related-crime*", "*computer-assisted-crime*", atau "*computer crime*". Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah "*computer crime*" oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional (Budi Suhariyanto, 2013: 9).

Cyber Crime merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial upsystem*, menggunakan jalur telepon, ataukah *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel (Maskun, 2013: 45).

Menurut Indra Safitri yang mengemukakan bahwa :

Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet (Maskun, 2013: 48).

Mengenai pencegahan kejahatan dan penanganan pelaku tindak pidana, yang membahas isu mengenai kejahatan yang berhubungan dengan jaringan komputer membagi *cyber crime* menjadi dua kategori (Maskun, 2013: 48) :

1) *Cyber crime* dalam arti sempit (*computer crime*)

Diartikan sebagai setiap perilaku ilegal yang ditunjukkan dengan sengaja pada operasi elektronik yang menargetkan sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh sistem komputer tersebut.

2) *Cyber crime* dalam arti luas (*computer related crime* atau kejahatan yang berkaitan dengan komputer)

Diartikan sebagai setiap perilaku ilegal yang dilakukan dengan maksud atau berhubungan dengan sistem komputer atau jaringan. Tindak pidana yang dilakukan dengan memakai komputer (*hardware* dan *software*) sebagai sarana atau alat, komputer sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak, dengan merugikan pihak lain.

c. Jenis-jenis Kejahatan *Cyber Crime*

Berbagai macam jenis kejahatan Teknologi Informasi yang dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) *Cyber-terrorism*

Serangan Elektronik melalui jaringan komputer terhadap infrastruktur penting yang berpengaruh pada kegiatan sosial dan ekonomi bangsa.

2) *Cyber-pornography*

Penyebaran bahan cabul termasuk pornografi, paparan tidak senonoh, dan pornografi anak.

3) *Cyber harassment*

Pelecehan seksual melalui email, *website* atau *chat programs*.

4) *Cyber-stalking*

a) Menjelek-jelekkan seseorang dengan menggunakan identitas seseorang yang telah dicuri sehingga menimbulkan kesan buruk terhadap orang tersebut.

b) Dengan mengetahui identitas, orang tersebut akan difitnah dan hancurlah nama baiknya.

Contoh dari kejahatan ini adalah penggunaan *password e-mail* kemudian mengirimkan *e-mail* fitnah kepada orang lain.

5) *Hacking*

Penggunaan *programming abilities* dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.

6) *Carding (credit card fund)*

Carding muncul ketika orang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum. Dari kejahatan-kejahatan akan memberi implikasi terhadap tatanan sosial masyarakat yang cukup signifikan khususnya di bidang ekonomi. Mengingat bergulirnya juga era *e-commerce*, yang sekarang telah banyak terjadi.

7) *Phising*

Suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi sensitif, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti *e-mail* atau pesan instan. Istilah ini muncul dari kata bahasa Inggris *fishing* ('memancing'), dalam hal ini berarti memancing informasi keuangan dan kata sandi pengguna. Pelaku *phising* disebut *Phisher* (<http://ambarwati.dosen.narotama.ac.id/files/2012/04/EP-w6-C2012.pdf>).

d. Karakteristik *Cyber Crime*

Berdasarkan literatur serta praktiknya, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- 1) perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atas atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber (*cyber space*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi mana yang berlaku terhadapnya;
- 2) perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet;
- 3) perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
- 4) pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
- 5) perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara (Budi Suhariyanto, 2013: 13).

e. Ruang Lingkup *Cyber Crime*

Berdasarkan literatur serta praktiknya, ruang lingkup *cyber crime* terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- 1) Pembajakan;
- 2) Penipuan;
- 3) Pencurian;
- 4) Pornografi;
- 5) Pelecehan;

- 6) Pemfitnahan;
- 7) Pemalsuan (Budi Suhariyanto, 2013: 13).

4. Tindak Pidana Perjudian secara *Online (Internet Gambling)*

a. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

1) Tindak Pidana Perjudian dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP

Perjudian adalah permainan dengan cara bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dan hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) menyebutkan, bahwa:

“yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umunya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Menurut Kartini Kartono judi sebagai:

“Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”.

2) Tindak Pidana Perjudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

b. Pengertian Perjudian Online

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *online* atau judi melalui internet (*internet gambling*) terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. *Online game* yang sesungguhnya, seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan *gambling online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai awal. Setelah petaruh mengirim uang aka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah koin akan berkurang.

c. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

1) Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian dala Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut. Dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) menggunakan kesempatan untuk main judi
- b) Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Pasal 303 KUHP menyebutkan unsur-unsur tindak pidana perjudian sebagai berikut:

- a) diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:

ke-1: dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ke-2: dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Ke-3: menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

- b) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- c) Permainan judi, adalah tiap-tiap permainan mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga apabila kemungkinan itu makin besar karena perminannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Sedangkan di dalam Pasal 303 *bis* KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Ke-1: barangsiapa yang menggunakan kesempatan terbuka sebagaimana tersebut Pasal 303, untuk bermain judi.

Ke-2: barang siapa turut serta bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum, kecuali jika untuk

bermain judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang.

- (3) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pembedaan yang dahulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini ancamannya dapat menjadi pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah (Suharto, 1996: 89-92).

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1)nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meningkat; juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat organisme semakin tegang dan makin gembira; menumbuhkan efek-efek, rasa had, renjana, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Pada kepercayaan sedemikian ini tampaknya anachronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak kurang masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu perjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera (Suharto, 1996: 89-92).

2) Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Apabila rumusan tersebut di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

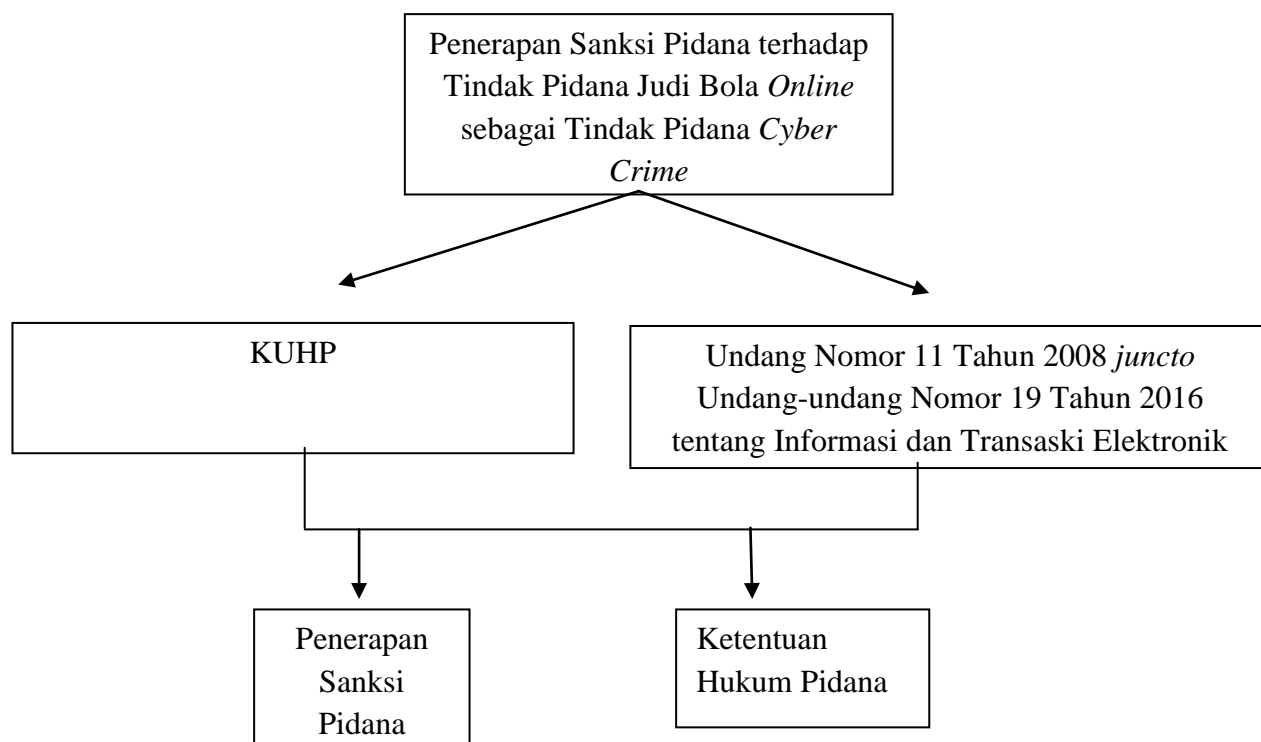
- a) Unsur subjektif:
 - (1) Kesalahan: dengan sengaja;
- b) Unsur objektif:
 - (1) Melawan hukum: tanpa hak;
 - (2) Perbuatan:
 - (a) mendistribusikan; dan/atau
 - (b) mentransmisikan; dan/atau
 - (c) membuat dapat diaksesnya;
- c) Objek:
 - (a) Informasi Elektronik; dan/atau
 - (b) Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 27 ayat (2) hampir sama seluruhnya sama dengan Pasal 27 ayat (1) maupun ayat (2) Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan maupun objeknya sama. Perbuatannya adalah mentransmisikan, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya. Objeknya adalah informasi dan/atau Dokumen Elektronik. Perbedaannya hanyalah unsur keadaan yang menyertai pada kedua objek tersebut.

Pada ayat (1) unsur keadaan yang menyertai objek adalah “yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”. Sementara pada ayat (2) ialah “yang memiliki muatan perjudian”. Oleh karena itu unsur yang sama tidak perlu dibahas lagi. Kiranya unsur perjudian saja yang perlu diterangkan. Indikator/syarat suatu tindak pidana *lex specialis* dari suatu *lex generalis*, maka tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2)

juncto 45 ayat (1) ini adalah merupakan *lex specialis* dari tindak pidana perjudian Pasal 303 dan 303 bis KUHP.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan pemikiran penulis dalam menganalisis, menjabarkan, dan menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian, yaitu mengenai ketentuan hukum dan penerapan sanksi pidana dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Judi Bola *Online*. Perjudian secara *online* telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun secara khusus Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai ketentuan hukum pidana dan sanksi pidana dalam kasus judi bola *online*. Namun terkadang para penegak hukum masih menggunakan KUHP dan tidak menerapkan asas berlakunya undang-undang, yaitu asas *lex specialis derogat legi generalie*. Penulis dalam hal ini ingin mengetahui apakah ketentuan hukum pidana dan penerapan sanksi pidana yang

layak dalam tindak pidana judi bola *online* dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ketentuan Hukum Pidana yang dapat Diterapkan dalam Tindak Pidana Judi Bola secara *Online*.

a. Pengaturan Perjudian dalam KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur secara khusus mengenai perjudian secara *online*, namun di dalam KUHP terdapat unsur-unsur yang memuat tentang perjudian secara umum.

Tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Frasa perjudian atau permainan judi (*hazardspel*) terdapat di dua pasal tersebut.

Pasal 303 KUHP merumuskan tentang larangan perjudian sebagai berikut.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa ijin:
 - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya itu.

- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan

Sementara dalam Pasal 303 bis KUHP merumuskan sebagai berikut.

- 1) perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 - a) barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b) barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian.
- 2) jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

b. Pengaturan Perjudian dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Apabila tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (2) *juncto* 45 ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut disalin dalam satu naskah, maka selengkapnya adalah sebagai berikut.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Apabila rumusan tersebut di atas dirinci, terdiri dari unsur-nsur sebagai berikut.

a. Unsur subjektif:

1) Kesalahan: dengan sengaja;

b. Unsur objektif:

(3) Melawan huku: tanpa hak;

(4) Perbuatan:

(i) mendistribusikan; dan/atau

(ii) mentransmisikan; dan/atau

(iii) membuat dapat diaksesnya;

c. Objek:

(i) Informasi Elektronik; dan/atau

(ii) Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

c. Pengaturan Perjudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana perjudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban Perjudian. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian merupakan bentuk perumusan dan penetapan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang untuk kepentingan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perjudian. Maksud dari pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Penertiban Perjudian seperti yang tercantum dalam konsiderannya, karena pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta

membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) atas Peraturan Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian disebutkan beberapa macam perjudian, yaitu:

- 1) Perjudian Kasino, antara lain terdiri:
 - a) Roulette;
 - b) Blackjack;
 - c) Bacarat;
 - d) Creps;
 - e) Keno;
 - f) Tombala;
 - g) Super Ping-Pong;
 - h) Lotto Fair;
 - i) Satan;
 - j) Paykyu;
 - k) Slot Machine (Jackpot);
 - l) Ji Si Kie;
 - m) Big Six Wheel;
 - n) Chuc a Cluck;
 - o) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan;
 - p) Yang berputar (Paseran);
 - q) Pachinko;
 - r) Poker;
 - s) Twenty One;
 - t) Hwa-Hwe;
 - u) Kiu-Kiu.
- 2) Perjudian ditempat-tempat keramaian:
 - a) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;

- b) Lempar gelang;
 - c) Lempat uang (coin);
 - d) Koin;
 - e) Pancingan;
 - f) Menebak sasaran yang tidak berputar;
 - g) Lempar bola;
 - h) Adu ayam;
 - i) Adu kerbau;
 - j) Adu kambing atau domba;
 - k) Pacu kuda;
 - l) Kerapan sapi;
 - m) Pacu anjing;
 - n) Hailai;
 - o) Mayong/Macak;
 - p) Erek-erek.
- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- a) Adu ayam;
 - b) Adu sapi;
 - c) Adu kerbau;
 - d) Pacu kuda;
 - e) Karapan sapi;
 - f) Adu domba atau kambing;
 - g) Adu burung merpati.
- 4) Tidak termasuk dalam pengertian perjudian yang dikaitkan kebiasaan-kebiasaan, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Judi Bola Secara Online

a. Pengaturan Sanksi Pidana dalam KUHP

Dalam KUHP terdapat Pasal yang merumuskan mengenai sanksi pidana perjudian. Pengaturan mengenai perjudian terdapat di dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Dalam Pasal 303 KUHP merumuskan tentang ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian yang diatur dalam ayat (1) yaitu:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa ijin.”

Dalam Pasal 303 bis KUHP merumuskan tentang ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian yang diatur dalam ayat (1), yaitu:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah bagi pelaku tindak pidana perjudian yang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 303 bis KUHP”

b. Pengaturan Sanksi Pidana dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 27 ayat (2) *juncto* 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

c. Pembahasan

1. Ketentuan Hukum Pidana yang dapat Diterapkan dalam Tindak Pidana Judi Bola secara *Online*.

1) Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Agus Salim Lubis als Krp
 Tempat lahir : Medan
 Umur/Tanggal lahir : 36/16 Agustus 1979
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jln.Bersama Gg. Pribadi No.20
 Kel.TembungKec.Medan Tembung
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta

2) Kasus Posisi

Adapun terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP pada hari Sabtu tanggal 06Februari 2016 sekitar pukul 22.30 WIB atau pada satu waktu di dalam bulanFebruari tahun 2016 di Jalan Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdangmengetahui permainan judi online bolamenerima pasangan taruhan judi bola, yang mana terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagaipencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itudengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan judi bola sesuai denganpertandingan yang sedang berlangsung di jalan Bantan Kel.Bantan Kec.PercutSei Tuan Kab.Deli Serdang dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhandari pertandingan bola yang berlangsung oleh pemasang taruhan melalupemasang menulis disebuah kertas yang berisikan pasangan taruhan judi bolayang dipertaruhkan serta pemasang memberikan uang taruhamnya kepadaterdakwa, dimana dalam 1(satu) lembar catatan tersebut

terdapat 7(tujuh)orang pemasang taruhan judi bola.Bahwa terdakwa melakukanpermainan judi Bola online dengan menggunakan 1(satu) unit Hand PhoneMerk Samsung yang sudah berisikan paket internet, dengan cara terdakwamembuka website yang bernama wap.sbobet.com , kemudian di monitor akanmuncul tampilan yang meminta user name dan password, lalu terdakwamemasukkan user name actmca1013 dengan password kk789789, pemasang dapat memasang pasangan sesuaidengan yang pemasang taruhkan melalui terdakwa, dengan jumlah taruhanminimal Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendeposit denganmentransferkan uang taruhan tersebut ke rekening Bandar yaitu nomorrekening 9000017109522 atas nama SOFIA ANNISA (DPO) melalui rekeningMandiri atas nama terdakwa AGUS SALIM LUBIS, Bahwa terdakwa melakukanpermainan judi bola itu setiap hari apabila ada pemasang yang ingin memasang taruhannyaterdakwa mendapatkeuntungan komisi sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap taruhansebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan omsetsetiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan jumlahkeuntungan setiap harinya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa dalammelakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihakyang berwenang, Bahwa pada saat terdakwa sedang membuka situs Onlinewap.sbobet.com dengan menggunakan 1(satu) unit Hand Phone MerkSamsung milik terdakwa, sambil menunggu pemasang taruhan judi bola onlinetiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Budianto, saksi M.Masri, saksi MuchlisAnsori Siregar, dan saksi M.Nirwansyah (ke empatnya adalah anggotaKepolisian Sat Reskrim Polresta Medan) yang sebelumnya mendapat informasidari masyarakat selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan danditemukan 1(satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 6(enam)lembar potongan

kertas berisi pasangan taruhan judi bola dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

3) Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan kasus posisi tersebut, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana paling lama duatahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin: dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Pasal 303 ayat (1) ke-2 yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana paling lama duatahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin: dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Adapun di dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 memuat unsur subyektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam diri pelaku:

a) Dengan sengaja

Pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja menurut *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :

(1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

- (2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

- (3) Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Kesengajaan harus memiliki tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat dari pokok dilarangnya perbuatan itu dan dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa AGUS SALIM LUBIS terbukti telah melakukan tindak pidana jud bolaseperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 483/Pid.b/2016/PN.Lbp. Terdakwa sebelumnya mengetahui permainan judi *online* bola dan dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi pada tanggal 06 februari 2016 di Deli Serdang dan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, serta menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Berdasarkan kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp juga memuat unsur-unsur mengenai kesengajaan sebagai maksud, bahwa terdakwa AGUS SALI LUBIS sebelumnya mengetahui adanya permainan judi bola *online* tersebut dan Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi bola *online* dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Unsur objektif yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 antara lain:

- (1) Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Terdakwa AGUS SALIM LUBIS dalam melakukan tidak pidana judi bola secara *online* dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan judi bola sesuai dengan pertandingan yang sedang berlangsung di Deli Serdang dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan dari pertandingan bola yang sedang berlangsung oleh pemasang taruhan melalui pemasang menulis disebuah kertas yang berisikan pasangan taruhan judi bola yang dipertaruhkan serta pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa.

Adapun di dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 memuat unsur subyektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam diri pelaku:

- a) Dengan sengaja

Pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja menurut *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :

(1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

(2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

(3) Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan

timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Kesengajaan harus memiliki tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat dari pokok dilarangnya perbuatan itu dan dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa AGUS SALIM LUBIS terbukti telah melakukan tindak pidana jud bola seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 483/Pid.b/2016/PN.Lbp. Terdakwa sebelumnya mengetahui permainan judi *online* bola dan dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi pada tanggal 06 februari 2016 di Deli Serdang dan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, serta menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Berdasarkan kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp juga memuat unsur-unsur mengenai kesengajaan sebagai maksud, bahwa terdakwa AGUS SALI LUBIS sebelumnya mengetahui adanya permainan judi bola *online* tersebut dan Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi bola *online* dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Unsur objektif yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 antara lain:

- 1) Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi.

Terdakwa AGUS SALIM LUBIS dalam melakukan tindak pidana judi bola secara *online* dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan judi bola sesuai dengan

pertandingan yang sedang berlangsung di Deli Serdang dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan dari pertandingan bola yang sedang berlangsung oleh pemasang taruhan melalui pemasang menulis disebuah kertas yang berisikan pasangan taruhan judi bola yang dipertaruhkan serta pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa.

- 2) Turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Terdakwa AGUS SALIM LUBIS sebelumnya telah mengetahui permainan judi bola *online* tersebut dan dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dimana terdakwa membuka taruhan judi bola *online* kepada para pemasang judi tersebut sesuai dengan jadwal pertandingan yang sedang berlangsung di wilayah Deli Serdang, maksimal taruhan yang dibayarkan oleh pemasang adalah Rp 1.500.000,00 dan uang tersebut akan disetorkan oleh terdakwa ke nomor rekening bandar melalui ATM terdakwa AGUS SALIM LUBIS. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 per satu taruhan dan terdakwa mendapatkan keuntungan tiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00.

4) Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- a) Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM LUBIS ALIAS KRP tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” ;
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e) Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisikan taruhan judi bola online dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;
 - 2) Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
 - 3) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Penerapan Sanksi Pidana yang Layak Diterapkan Terhadap Tindak Pidana Judi Bola secara *Online* dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp

Berdasarkan kasus ini terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikenakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP . Dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus kasus ini didasarkan pada unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana. Terdakwa AGUS SALIM LUBIS dimana Terdakwa adalah warga negara Indonesia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini.

b. Dengan sengaja

Pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam

Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja menurut *willenswetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

- 2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

- 3) Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Kesengajaan harus memiliki tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat dari pokok dilarangnya perbuatan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa AGUS SALIM LUBIS terbukti telah melakukan tindak pidana judi bola seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 483/Pid.b/2016/PN.Lbp. Terdakwa sebelumnya mengetahui permainan judi *online* bola dan dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk

bermain judi pada tanggal 06 februari 2016 di Deli Serdang dan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, serta menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Berdasarkan kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp juga memuat unsur-unsur mengenai kesengajaan sebagai maksud, bahwa terdakwa AGUS SALI LUBIS sebelumnya mengetahui adanya permainan judi bola *online* tersebut dan Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi bola *online* dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

- c. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut campur dalam suatu perusahaan untuk itu.

Terdakwa AGUS SALIM LUBIS dalam melakukan tidak pidana judi bola secara *online* dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Hal ini dibuktikan dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan judi bola sesuai dengan pertandingan yang sedang berlangsung di Deli Serdang dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan dari pertandingan bola yang sedang berlangsung oleh pemasang taruhan melalui pemasang menulis disebuah kertas yang berisikan pasangan taruhan judi bola yang dipertaruhkan serta pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa. Terdakwa dalam melakukan permainan judi bola *online* tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan kasus ini lebih tepat jika dikenakan aturan yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini dikarenakan di dalam ketentuan tersebut mengatur tindak pidana perjudian secara khusus

jika dibandingkan dengan Pasal 303 KUHP yang hanya mengatur tindak pidana perjudian secara konvensional.

Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Berdasarkan kasus dalam Putusan Nomor 483/Pid.b/2016/PN.Lbp apabila dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dapat diuraikan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa AGUS SALIM LUBIS dimana Terdakwa adalah warga negara Indonesia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu

menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini.

b. Dengan Sengaja

Pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :

1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

3) Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Kesengajaan harus memiliki tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat dari pokok dilarangnya perbuatan itu dan bahwa

perbuatan itu melanggar hukum, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa melakukan perjudian togel *online* dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuka website yang bernama wap.spobet.com dengan menggunakan handphone merk samsung yang sudah berisikan paket internet, kemudian di layar monitor akan muncul tampilan yang meminta *username* dan *password*. Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS SALIM LUBIS merupakan perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan kesadaran, dimana Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari pemasangan angka/nomor yang dimasukkan dalam situs online tersebut, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan Terdakwa melakukan semua perbuatannya bukan karena paksaan atau disuruh tetapi niat sendiri yang aturan hukum melarang untuk itu dengan harapan mendapatkan keuntungan materi berupa uang.

- c. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang dalam hal ini adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Mendistribusikan menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).

Memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian judi atau perjudian diartikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi :

“tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertaruhan lainnya”.

Terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 22.30 Wib atau pada satu waktu di dalam bulan Februari tahun 2016 di Jalan Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang mengetahui permainan judi *online* bola menerima pasangan taruhan judi bola, yang mana terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan judi bola sesuai dengan pertandingan yang sedang berlangsung di jalan Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan dari pertandingan bola yang berlangsung oleh pemasang taruhan melalui pemasang menulis disebuah kertas yang berisikan pasangan taruhan judi bola yang dipertaruhkan serta pemasang memberikan uang taruhannya kepada terdakwa, dimana dalam 1(satu) lembar catatan tersebut terdapat 7(tujuh) orang pemasang taruhan judi bola. Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola *online* dengan menggunakan 1(satu) unit *HandPhoneMerk* Samsung yang sudah berisikan paket internet, dengan cara terdakwa membuka *website* yang bernama wap.sbobet.com , kemudian di monitor akan muncul tampilan yang meminta *username* dan *password*, lalu terdakwamemasukkan *username* actmca1013 dengan *password* kk789789, pemasang dapat

memasang pasangan sesuai dengan yang pemasang taruhkan melalui terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendeposit dengan mentransferkan uang taruhan tersebut ke rekening Bandar yaitu nomor rekening 9000017109522 atas nama SOFIA ANNISA (DPO) melalui rekening Mandiri atas nama terdakwa AGUS SALIM LUBIS. Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola itu setiap hari apabila ada pemasang yang ingin memasang taruhannya terdakwa mendapat keuntungan komisi sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan omset setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan jumlah keuntungan setiap harinya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang,

Berdasarkan kasus ini maka lebih tepat apabila menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini disebabkan karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa lebih memenuhi unsur rumusan dalam Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibandingkan KUHP. Perjudian yang diatur dalam KUHP merupakan perjudian secara umum sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur lebih lanjut mengenai perjudian dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa hp sehingga berdasarkan asas *lex specialis deogat legi generalie* maka perbuatan yang telah

dilakukan oleh terdakwa lebih tepat apabila dikenakan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana formil, karena Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi bola secara *online* dimana tindakan tersebut telah nyata dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Tindak pidana judi bola secara *online* telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 yang ancaman pidananya berupa Pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah. Penerapan sanksi pidana terhadap judi bola secara *online* yang dilakukan oleh terdakwa meskipun pengaturannya terdapat dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, namun aturan tersebut masih bersifat umum sedangkan terdapat pengaturan yang lebih khusus mengenai judi bola secara *online* yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kasus ini maka penerapan sanksi yang tepat untuk diterapkan adalah Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bagaian dari tata hukum di Indonesia, bersamaan dengan perundang-undangan lainnya. Landasan yuridis dalam menentukan ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian anatara lain Pasal 303 dan 303 bis KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang memuat unsur-unsur tindak pidana perjudian secara umum. Namun perjudian yang dilakukan secara *online* atau melalui perantara teknologi dan informasi telah termuat dalam Pasal 27 ayat (2) *juncto* 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya mengatur lebih khusus mengenai tindak pidana perjudian secara *online*.
2. Bahwa dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/216/PN/Lbp hakim menjatuhkan vonis kepada Terdakwa AGUS SALIM LUBIS yang melakukan tindak pidana judi bola *online* dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa AGUS SALIM LUBIS telah memuat unsur-unsur tindak pidana judi bola secara online yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik, yaitu unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalie*, Putusan Nomor 483/Pid.B/216/PN/Lbp lebih tepat dikenakan aturan dalam Pasal 27

ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibandingkan dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Agus Salim Lubis merupakan tindak pidana perjudian bola secara *online* dan bukan perjudian secara konvensional.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan di atas yaitu mengenai penerapan sanksi pidana yang tepat dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN. Lbp tentang tindak pidana judi bola secara *online*, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penerapan asas *lex specialis derogat legi generalie* bagi hakim dalam menentukan ketentuan hukum yang tepat terhadap terdakwa tindak pidana judi bola secara *online* dan tidak melulu menerapkan ketentuan yang ada dalam KUHP.
2. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana jud bola secara *online* di Indonesia, alangkah lebih baik para penegak hukum memperhatikan ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dalam Undang-Undang ini telah diatur secara khusus mengenai tindak pidana judi bola secara *online*.. Oleh karena terdapat perbedaan pengaturan di dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, maka penerapan hukum yang digunakan adalah yang memuat aturan hukum yang terberat. Oleh karena itu agar memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat, sebaiknya penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana judi bola secara *online* menggunakan aturan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) *juncto* 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang. Media Nusa Creative.
- Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Aziz Syamsuddi. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber*. Jakarta. Kencana.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosisal dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Teguh Prasetya. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Winarno Budyatmojo. 2009. *Hukum Pidana Kodifikasi*. Solo. Sebelas Maret University Press.
- Suharto RM. 1996. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Griffiths, M.D. (2003). Internet Gambling: Issues, concerns, and recommendations. *CyberPsychoogy & Behaviour* 6:6.
- Griffiths, M.D. (2010). Crime and Gambling: A brief overview of gambling fraud on the Internet. *Internet Journal of Criminology*.

Hassanah, H. Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

Supanto. 2016. Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*cyber crime*) dan Antisipasinya dengan Penal *Policy*. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

<http://ambarwati.dosen.narotama.ac.id/files/2012/04/EP-w6-C2012.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KUHP